

Etika Sosial Dalam Tafsir Al-Azhar: Analisis Penafsiran Ayat Akhlak Buya Hamka dan Relevansinya Terhadap Agenda Reformasi Akhlak

M. Zulfani Hidayat¹, Nur Arfiyah Febriani²

¹ Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta

Email: ¹mzulfani.hidayat@gmail.com, ²febriani@ptiq.ac.id

Received:
June 28, 2026

Revised:
June 29, 2026

Accepted:
June 30, 2026

Online:
July 01, 2026

Abstract

This article provides an in-depth analysis of Haji Abdul Malik Karim Amrullah's (Buya Hamka) interpretation of ethical (akhlāq) verses in his monumental work, Tafsir al-Azhar, and examines its relevance to contemporary moral reform in Indonesia. This qualitative study employs a library research approach using content analysis to examine Tafsir al-Azhar alongside relevant supporting literature. The findings reveal that Buya Hamka adopts the *taḥlīlī* (analytical) method with an *adabī al-ijtimā'ī* (literary, cultural, and socio-communal) orientation to contextualize Qur'anic ethical teachings within the socio-cultural realities of Indonesia. Through his interpretation of universal ethical principles such as the conceptual formulation of social ethics in QS. an-Nahl: 90, individual integrity through the critique of hypocrisy in QS. al-Baqarah: 8–10, and the ethics of public authority in QS. al-Nisā': 58 Hamka transforms classical akhlāq into an instrument of social criticism. Furthermore, this study demonstrates that Hamka's ethical construction provides a profound spiritual and moral foundation that aligns with the Indonesian government's contemporary agenda, particularly in internalizing the "BerAKHLAK" core values for civil servants to advance bureaucratic reform and national character development. The article concludes that the ethical interpretation in Tafsir al-Azhar successfully constructs a model of public ethics that bridges transcendental prophetic values with local wisdom, serving as a responsive pillar for modern societal transformation.

Keywords: Buya Hamka, Tafsir al-Azhar, Ethical Verses, *Adabī al-Ijtimā'ī*, Moral Reform.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) terhadap ayat-ayat akhlak dalam karya monumental beliau, Tafsir al-Azhar, serta relevansinya terhadap agenda reformasi moral di Indonesia. Penelitian bersifat kualitatif menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap teks Tafsir al-Azhar serta literatur pendukung terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buya Hamka menerapkan metode *taḥlīlī* (analitis) bercorak *adabī al-ijtimā'ī* (sastra-budaya-kemasyarakatan) untuk membumikan ayat-ayat etika ke dalam realitas kebudayaan Indonesia. Melalui analisis penafsiran ayat-ayat etis universal seperti fondasi etika sosial dalam QS. an-Nahl: 90, penguatan integritas personal melalui kritik kemunafikan dalam QS. al-Baqarah: 8–10, dan etika kekuasaan publik dalam QS. al-Nisā': 58 Hamka berhasil mentransformasikan konsep akhlak klasik menjadi instrumen kritik sosial dan panduan aplikatif masyarakat. Lebih lanjut, penafsiran ini terbukti memiliki irisan kuat dengan agenda kontemporer pemerintah, khususnya sebagai fondasi spiritual-etis bagi internalisasi nilai dasar (*Core Values*) ASN "BerAKHLAK" demi mendukung reformasi birokrasi dan penguatan karakter bangsa. Artikel ini menyimpulkan bahwa penafsiran akhlak dalam Tafsir al-Azhar berhasil membangun model etika publik yang moderat, menjembatani nilai profetik transendental dengan kearifan lokal, serta responsif terhadap tantangan modernitas.

Kata Kunci: Buya Hamka, Tafsir al-Azhar, Ayat Akhlak, *Adabī al-Ijtimā'ī*, Reformasi Akhlak.



1. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang senantiasa berdialog dengan zaman dan ruang, menuntut setiap generasi untuk melakukan pembacaan ulang agar maknanya tetap relevan dengan realitas kehidupan. Di Indonesia, salah satu upaya monumental dalam membumikan pesan wahyu tersebut tercermin secara benderang dalam *Tafsir al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka. Karya lengkap 30 juz ini bukan sekadar produk akademik yang lahir di balik meja kerja steril, melainkan sebuah kristalisasi dari pergulatan sejarah, spiritual, dan intelektual mendalam, yang sebagian besar ditulis ketika Hamka berada dalam tekanan sebagai tahanan politik pada masa Orde Lama (Rush 2016).

Fenomena *Tafsir al-Azhar* menarik perhatian luas karena keberhasilannya menjembatani jarak antara semangat keberagaman generasi muda Indonesia dengan keterbatasan kemampuan bahasa Arab mereka. Hamka secara sadar memilih bahasa Indonesia atau Melayu yang hidup, komunikatif, dan bernuansa sastra sebagai medium dakwah utamanya. Pilihan ini dibaca oleh Howard M. Federspiel (1994) sebagai bagian dari pembentukan Islam nasional Indonesia, di mana Al-Qur'an tidak lagi diposisikan sebagai teks asing berbahasa Arab, melainkan sebagai teks hidup dalam kebudayaan lokal. Pendekatan ini menempatkan karya Hamka dalam arus corak *adabī al-ijtimā'ī*, sebuah metodologi penafsiran yang tidak hanya berkutat pada aspek literal teks atau perdebatan gramatikal yang rumit, melainkan sangat peka terhadap problematika sosial-kemasyarakatan (Gusmian 2003).

Meskipun aspek metodologi global dan unsur lokalitas dalam *Tafsir al-Azhar* telah banyak dikaji oleh para sarjana, fokus diskursus mengenai rekonstruksi ayat-ayat akhlak secara spesifik masih memerlukan pendalaman yang lebih komprehensif. Bagi Hamka, akhlak bukanlah sekadar doktrin moralitas pasif atau etika individual yang terisolasi dari ruang publik. Sebaliknya, akhlak diposisikan sebagai tolak ukur keaslian iman dan buah nyata dari pelaksanaan syariat. Dalam realitas sosiologis masyarakat modern yang kerap menghadapi krisis multidimensional, egoisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, penafsiran etis Buya Hamka menawarkan sebuah kerangka aksiologis yang segar.

Di tengah pusaran modernitas, pemerintah Indonesia hari ini gencar menggaungkan agenda reformasi akhlak dan transformasi karakter bangsa demi mewujudkan tata kelola publik yang bersih, harmonis, dan berintegritas. Aktualisasi nilai-nilai etis bernegara seperti nilai akuntabilitas, transparansi, pencegahan kezaliman, serta loyalitas pada pelayanan publik menjadi fondasi utama yang diikhtikarkan secara struktural oleh pemerintah. Namun, gerakan reformasi akhlak ini kerap kali terjebak pada tataran formalitas birokrasi dan kehilangan ruh spiritualnya. Di sinilah relevansi *Tafsir al-Azhar* menemukan momentumnya kembali. Penafsiran akhlak Buya Hamka menawarkan sebuah jembatan hermeneutik yang mampu mentransformasikan jargon-jargon reformasi moral kontemporer menjadi sebuah kesadaran batin yang berakar kuat pada nilai-nilai profetik transendental dan kearifan lokal Nusantara.

Artikel ini bertujuan untuk membedah bagaimana Buya Hamka mengontekstualisasikan ayat-ayat akhlak di dalam *Tafsir al-Azhar*. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini akan mengurai karakteristik, metode, serta contoh konkret penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat yang memuat perintah etis universal, seperti keadilan, kebajikan (*iḥsān*), dan tanggung jawab sosial, sekaligus larangan terhadap kerusakan moral (*al-fahshā'*, *al-munkar*, dan *al-baghy*). Melalui fokus ini, diharapkan artikel ini mampu menyajikan gambaran utuh mengenai kontribusi intelektual Buya Hamka dalam membumikan akhlak Islam sebagai energi transformasi sosial yang moderat dan kontekstual di Indonesia.



2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan fokus pada studi analisis teks. Objek utama penelitian ini adalah kitab *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka sebagai sumber data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini didukung oleh literatur kritis dari para sarjana terkait, seperti Isiah Gusmian, Howard M. Federspiel, dan James R. Rush.

Data dikumpulkan secara sistematis melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, mengklasifikasi, dan menelaah ayat-ayat yang bertemakan etika sosial serta catatan penafsirannya di dalam kitab primer. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan teknik analisis isi (*content analysis*). Langkah analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber riwayat (*ma'tsūr*) maupun ijtihad rasional (*ra'y*) yang digunakan Hamka dalam menafsirkan ayat akhlak, kemudian menguraikan bagaimana corak *adabī al-ijtimā'ī* dan unsur lokalitas Nusantara diintegrasikan untuk melahirkan pemahaman etis yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosiopolitik terkini.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Profil Ringkas Kitab Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar merupakan capaian intelektual tertinggi dari Buya Hamka yang lahir dari perpaduan unik antara tradisi Islam klasik (*turāth*) dan kesadaran terhadap realitas sosial Indonesia. Genealogi naskah monumental ini berakar pada materi kuliah Subuh yang disampaikan secara rutin oleh Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, semenjak akhir tahun 1950-an. Melalui interaksi lisan dengan jamaah perkotaan yang sangat majemuk inilah, karakter penulisan dan gaya bahasa *Tafsir al-Azhar* mengkristal menjadi narasi yang sangat inklusif, komunikatif, dan persuasif bagi umat luas (Hamka 1982). Proses penyusunan karya ini kemudian mengalami titik balik eksistensial yang dramatis ketika Buya Hamka dikebloskan ke dalam penjara tanpa proses peradilan yang transparan oleh rezim Orde Lama pada tahun 1964 hingga 1966. Di tengah ruang isolasi tahanan politik yang penuh tekanan dan keterbatasan akomodasi ilmiah itulah, Hamka justru memperoleh momentum perenungan spiritual mendalam untuk merampungkan dan menyempurnakan bagian-bagian krusial dari tafsir 30 juz ini (Rush 2016).

Secara metodologis, *Tafsir al-Azhar* disusun dengan menggunakan sistematika *tartīb mushafti*, yaitu menguraikan eksplanasi secara berurutan berdasarkan susunan surah dan ayat sebagaimana tertib yang mapan dalam mushaf Utsmanic, diawali dari surah al-Fātiḥah dan dipungkasi pada surah an-Nās (Hamka 1982). Model penulisan yang linier ini ditopang oleh kerangka utama metode *tahlīlī* (analitis) yang sangat rigid, di mana Hamka membedah teks suci ayat demi ayat secara mandiri sebelum menautkannya ke dalam jaringan makna eksternal (Hamka 1982b). Kendati demikian, pada bagian kisah-kisah historis tertentu yang dipandang telah dipahami secara umum, Hamka kerap menerapkan sentuhan gaya penulisan global (*ijmālī*) demi menjaga efektivitas pesan dakwah agar tidak terjebak dalam perdebatan ilmiah yang rumit (Hamka 1982b). Dari segi epistemologi sumber, Hamka secara harmonis mengintegrasikan corak *tafsir bi al-ma'tsūr*—melalui teknik hermeneutik ayat menafsirkan ayat (*al-Qur'ān yufassiru ba'duhu ba'dan*) serta kutipan hadis-hadis masyhur (Hamka 1982)—dengan ruang ijtihad rasional (*tafsir bi al-ra'y*) yang menempatkan akal sebagai instrumen vital untuk merespons dinamika sejarah (Hamka 1982).

Karakteristik yang paling melekat sebagai Identitas utama *Tafsir al-Azhar* adalah coraknya yang bermuara pada pendekatan *adabī al-ijtimā'ī* (sastra-budaya-kemasyarakatan). Hamka secara sadar menolak dikotomi antara sastra dan agama; ia sengaja meminimalisasi analisis filologis teknis yang



elitis seperti perdebatan gramatikal (*i'rāb*), ragam bacaan (*qirā'āt*), retorika (*balāghah*), maupun fragmentasi mazhab fikih normatif dan diskursus kalam klasik yang kaku (Gusmian 2003). Seluruh perangkat kebahasaan dan teologis klasik tersebut ditundukkan secara organik di bawah tujuan pembinaan etika publik, sehingga Al-Qur'an menjelma sebagai kitab petunjuk (*hudā*) yang hidup di tengah realitas sosial, responsif terhadap kemajuan materi, serta mampu membumikan pesan moral universal wahyu ke dalam ruang kebudayaan masyarakat Nusantara (Federspiel 1994).

3.2. Konstruksi Epistemologi Akhlak dalam Pandangan Buya Hamka

Dalam Tafsir al-Azhar, Hamka memandang akhlak bukan sebagai pelengkap ajaran agama, melainkan manifestasi nyata dari kualitas akidah dan syariat seorang Muslim. Akidah yang benar tidak cukup berhenti pada keyakinan teologis, tetapi harus terwujud dalam perilaku yang mencerminkan kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Demikian pula, syariat dipahami sebagai sarana pembentukan karakter sehingga ibadah akan kehilangan makna apabila tidak menghasilkan perubahan moral dalam kehidupan sehari-hari (Hamka, 1989; Al-Ghazali, 2011).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa epistemologi akhlak Hamka berakar pada paradigma tauhid yang integral. Hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*). Oleh karena itu, kesalehan individual harus berjalan seiring dengan kepedulian sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan komitmen terhadap keadilan. Dalam perspektif ini, Hamka menolak pemisahan antara ritual keagamaan dan tanggung jawab sosial, sebab keduanya merupakan ekspresi dari keimanan yang sama (Gusmian, 2003; Al-Attas, 1995).

Pendekatan Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat akhlak juga memiliki karakter psikologis dan reflektif. Penafsirannya tidak berhenti pada uraian normatif mengenai baik dan buruk, tetapi mengajak pembaca memahami dinamika batin manusia, seperti ego, hawa nafsu, ambisi, dan godaan moral yang dihadapi dalam kehidupan. Karena itu, gaya tafsir Hamka lebih bersifat persuasif dan edukatif daripada menghakimi. Melalui ilustrasi kehidupan sosial, sejarah, dan pengalaman personal, ia berupaya membumikan nilai-nilai Al-Qur'an agar menjadi pedoman praktis dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun ruang publik (Rush, 2016).

Lebih jauh, epistemologi akhlak Hamka memadukan wahyu, akal, dan pengalaman sosial sebagai sumber pembentukan moral. Al-Qur'an menjadi landasan utama nilai-nilai etika, sementara akal berfungsi memahami hikmah ajaran, dan realitas sosial menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai tersebut. Sebagaimana dicatat oleh Federspiel (1994), kekuatan *Tafsir al-Azhar* terletak pada kemampuannya mengontekstualisasikan pesan-pesan Al-Qur'an dengan dinamika masyarakat Indonesia modern. Dengan demikian, konstruksi akhlak dalam pemikiran Hamka tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga humanis, kontekstual, dan transformatif sehingga relevan sebagai dasar reformasi akhlak dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

3.3. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Akhlak dalam *Tafsir al-Azhar*

3.3.1. Fondasi Etika Sosial Islam: Analisis QS. an-Nahl [16]: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾

90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Surah *an-Nahl* ayat 90 merupakan salah satu ayat yang oleh banyak ulama dipandang sebagai rumusan paling komprehensif mengenai etika sosial dalam Al-Qur'an. Dalam *Tafsir al-Azhar*, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini memuat tiga perintah pokok, yaitu berlaku adil (*al-'adl*), berbuat



kebajikan (*al-ihsan*), dan memberikan hak kepada kerabat (*ita'i dzi al-qurba*), sekaligus tiga larangan yang menjadi sumber kerusakan sosial, yaitu *al-fahsha'*, *al-munkar*, dan *al-baghy* (Hamka, 1989). Menurut Hamka, keenam prinsip tersebut bukanlah aturan moral yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan nilai yang mengarahkan manusia untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam menjelaskan konsep *al-'adl*, Hamka tidak membatasinya pada aspek hukum atau peradilan, tetapi memaknainya sebagai sikap menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan memberikan hak kepada setiap orang tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Sementara itu, *al-ihsan* dipahami sebagai tingkat moral yang lebih tinggi daripada keadilan, yakni kesediaan berbuat baik melebihi batas kewajiban sebagai bentuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap tindakan. Adapun perintah memberi kepada kerabat menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial menurut Al-Qur'an harus dimulai dari lingkungan keluarga sebelum berkembang ke masyarakat yang lebih luas (Hamka, 1989). Penafsiran ini memperlihatkan bahwa etika sosial dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penegakan hak, tetapi juga pada penguatan solidaritas dan kepedulian antarsesama.

Sebaliknya, Hamka menjelaskan bahwa *al-fahsha'*, *al-munkar*, dan *al-baghy* merupakan tiga bentuk penyimpangan yang dapat merusak tatanan masyarakat. *Al-fahsha'* dipahami sebagai segala bentuk perilaku keji yang merusak kehormatan diri, *al-munkar* sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai agama dan akal sehat, sedangkan *al-baghy* merujuk pada sikap melampaui batas melalui kezaliman, kesewenang-wenangan, dan penyalahgunaan kekuasaan (Hamka, 1989). Dengan demikian, Hamka memandang kerusakan sosial tidak hanya lahir dari lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dari hilangnya nilai-nilai moral yang menjadi fondasi kehidupan bersama.

Penafsiran tersebut menunjukkan corak sosial (*adabi ijtimai*) yang kuat dalam *Tafsir al-Azhar*. Sebagaimana dikemukakan oleh Islah Gusmian (2003), Hamka cenderung mengontekstualisasikan pesan Al-Qur'an dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai Al-Qur'an tidak berhenti sebagai norma ideal, tetapi hadir sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sosial. Dalam konteks penelitian ini, QS. *an-Nahl* [16]: 90 menjadi dasar konseptual bagi agenda reformasi akhlak karena menegaskan bahwa pembaruan masyarakat harus dibangun melalui peneguhan keadilan, kepedulian sosial, dan pengendalian berbagai bentuk penyimpangan moral. Dengan demikian, reformasi akhlak menurut Hamka bukan hanya bertujuan membentuk kesalehan individu, tetapi juga mewujudkan tatanan sosial yang berkeadaban.

3.3.2. Kejujuran dan Kritik terhadap Kemunafikan: Analisis QS. al-Baqarah [2]: 8–10.

Akhlak tidak hanya mengatur hubungan lahiriah antarmanusia, tetapi bermula dari kejujuran batin terhadap diri sendiri dan Tuhan. Dalam mengulas watak moral, Buya Hamka menyajikan analisis mendalam saat menafsirkan ayat tentang kelompok munafik pada surah al-Baqarah ayat 8-10:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ ٨ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ ٩ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ١٠ مَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝ ١٠

8. Di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari Akhir,” padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang mukmin. 9. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta.

Hamka memandang QS. al-Baqarah [2]: 8–10 tidak hanya menjelaskan karakter kaum munafik pada masa Nabi Muhammad saw., tetapi juga mengungkap penyakit moral yang dapat muncul pada

setiap zaman. Menurut Hamka, ukuran keimanan tidak terletak pada pengakuan lisan semata, melainkan pada keselarasan antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ketidaksesuaian antara ketiganya merupakan bentuk kemunafikan yang menggerus integritas pribadi sekaligus merusak kepercayaan sosial (Hamka, 1989).

Hamka menafsirkan frasa *fi qulūbihim maraḍ* sebagai penyakit batin berupa kesombongan, iri hati, ambisi duniawi, dan kepura-puraan. Penyakit tersebut bukan hanya menghalangi seseorang menerima kebenaran, tetapi juga melahirkan perilaku manipulatif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, nifak dipandang sebagai krisis moral yang lebih berbahaya daripada kekafiran yang dinyatakan secara terbuka, sebab pelakunya menyembunyikan kebatilan di balik simbol-simbol keagamaan (Hamka, 1989). Pandangan ini memiliki kedekatan dengan konsep *tazkiyat al-naḥs* dalam etika Islam klasik yang menempatkan penyucian hati sebagai prasyarat lahirnya akhlak mulia (Al-Ghazali, 2011).

Dari sisi metodologi tafsir, penjelasan Hamka memperlihatkan kecenderungan *adabi ijtimā'i*, yaitu menghubungkan makna ayat dengan problem sosial yang dihadapi masyarakat. James R. Rush (2016) mencatat bahwa Hamka secara konsisten menggunakan pengalaman hidup, psikologi manusia, dan realitas sosial Indonesia sebagai medium untuk menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an. Karakter kontekstual tersebut juga diidentifikasi dalam penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa kekuatan *Tafsir al-Azhar* terletak pada kemampuannya menghadirkan Al-Qur'an sebagai pedoman etis yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Melayu modern.

Penafsiran Hamka mengandung pesan bahwa reformasi akhlak tidak dapat dibangun hanya melalui penegakan norma atau aturan formal. Reformasi harus diawali dengan pembentukan integritas pribadi melalui kejujuran, ketulusan, dan konsistensi antara iman dan perilaku. Dengan demikian, kritik Al-Qur'an terhadap kemunafikan tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga menjadi fondasi etika sosial yang menuntut lahirnya individu-individu berintegritas sebagai prasyarat terciptanya masyarakat yang berkeadaban.

3.3.3. Etika Kekuasaan dan Amanah Publik: Analisis QS. al-Nisā' [4]: 58

Akhlak dalam pandangan Buya Hamka tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga menjadi landasan etika dalam penyelenggaraan kekuasaan. Hal ini tampak ketika beliau menafsirkan QS. *al-Nisā'* [4]:58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak serta setiap keputusan ditetapkan secara adil.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. *al-Nisā'* [4]:58).

Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menjelaskan bahwa amanah tidak hanya berkaitan dengan titipan harta, tetapi mencakup seluruh bentuk tanggung jawab, termasuk jabatan, kepemimpinan, dan kewenangan publik. Menurutnya, setiap jabatan merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kapasitas, integritas, dan tanggung jawab moral sehingga tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi ataupun hubungan kekerabatan (Hamka, 1989). Penafsiran Hamka terhadap ayat ini menempatkan kompetensi (*ahliyyah*) dan amanah sebagai dua syarat utama kepemimpinan Islam. Kepemimpinan tidak dipandang sebagai hak istimewa, tetapi sebagai tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat (Hanifah, 2024). Dalam tafsir al-Azhar juga dijelaskan nilai kepemimpinan dalam dibangun di atas tiga prinsip utama, yaitu amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang berintegritas sekaligus menjadi kritik terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan



kekuasaan yang mengabaikan kepentingan publik (Halid, 2026). Karakter penafsiran ini memperlihatkan corak *adabi ijtimai* yang menjadi ciri khas *Tafsir al-Azhar*. Hamka secara konsisten menghubungkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial Indonesia sehingga ayat-ayat akhlak tidak berhenti sebagai norma ideal, tetapi menjadi pedoman etis dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, penafsiran Hamka terhadap QS. *al-Nisā'* [4]:58 menunjukkan bahwa reformasi akhlak tidak hanya menyentuh pembinaan moral individu, tetapi juga menuntut reformasi etika publik melalui peneguhan amanah, keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan.

3.4. Relevansi Penafsiran Akhlak Buya Hamka terhadap Agenda Reformasi Akhlak

Penafsiran akhlak dalam *Tafsir al-Azhar* memiliki relevansi yang kuat dengan agenda reformasi akhlak yang dikembangkan pemerintah Indonesia melalui penguatan budaya kerja aparatur negara, pembangunan karakter bangsa, serta reformasi birokrasi yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi pada era kontemporer tidak lagi hanya menekankan perubahan kelembagaan, tetapi juga transformasi budaya organisasi melalui internalisasi nilai-nilai etika seperti akuntabilitas, profesionalisme, harmoni, kolaborasi, dan orientasi pelayanan. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan pemerintah dalam Core Values ASN BerAKHLAK sebagai fondasi budaya kerja aparatur sipil negara.

Apabila dicermati lebih jauh, nilai-nilai tersebut memiliki irisan yang erat dengan konstruksi akhlak yang dikembangkan Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*. Ketika menafsirkan QS. *al-Nisā'* [4]:58, Hamka menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kapasitas, integritas, dan tanggung jawab moral (Hamka, 1989). Amanah tidak dipahami sebatas kewajiban administratif, tetapi sebagai pertanggungjawaban spiritual di hadapan Allah Swt. Dengan demikian, akuntabilitas menurut Hamka tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bersumber dari kesadaran moral dan keimanan. Perspektif ini sejalan dengan konsep budaya kerja ASN BerAKHLAK yang menempatkan nilai akuntabel, kompeten, dan berorientasi pelayanan sebagai fondasi utama birokrasi modern (Syawitri, Fitriasia, & Ofianto, 2022; Nurmiyati, 2025).

Selain aspek amanah, reformasi akhlak juga memerlukan pembangunan integritas personal sebagai fondasi etika publik. Dalam penafsirannya terhadap QS. *al-Baqarah* [2]:8–10, Hamka menjelaskan bahwa kemunafikan bukan sekadar persoalan teologis, tetapi merupakan krisis moral yang ditandai oleh ketidaksesuaian antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan (Hamka, 1989). Menurut Hamka, penyakit hati seperti kesombongan, kepura-puraan, dan ambisi duniawi akan melahirkan perilaku manipulatif yang pada akhirnya merusak kepercayaan sosial. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak cukup dilakukan melalui pembenahan regulasi, tetapi harus disertai pembentukan integritas aparatur agar nilai-nilai akuntabilitas benar-benar tumbuh sebagai kesadaran moral, bukan sekadar kepatuhan administratif. Pandangan menegaskan bahwa implementasi nilai BerAKHLAK hanya akan efektif apabila didukung oleh internalisasi karakter dan etika individu, bukan sekadar pemenuhan indikator kinerja (Syawitri, 2022). Dengan demikian, penafsiran Hamka memberikan dimensi spiritual terhadap pembangunan budaya integritas yang menjadi salah satu fokus utama reformasi birokrasi di Indonesia.

Pada dimensi harmonisasi sosial. Dalam penafsirannya terhadap QS. *al-Hujurat* [49]:11–12, Hamka menempatkan larangan mencela, menggunjing, dan berprasangka buruk sebagai instrumen untuk menjaga persaudaraan dan kohesi sosial (Hamka, 1989). Penafsiran ini menjadi semakin kontekstual pada era digital ketika penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial berkembang melalui media sosial. Nilai harmonis dan kolaboratif yang menjadi bagian dari Core Values ASN BerAKHLAK pada dasarnya memiliki orientasi yang sama, yakni membangun budaya dialog, saling menghormati,

dan kerja sama lintas kelompok sebagai prasyarat terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan inklusif. Internalisasi nilai-nilai tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan budaya organisasi pemerintahan. (Gunawan, 2024)

Lebih jauh, penafsiran Hamka terhadap QS. *an-Naḥl* [16]:90 memperlihatkan bahwa keadilan (*al-'adl*) dan kebajikan (*al-iḥsān*) merupakan fondasi utama kehidupan sosial. Hamka memandang bahwa berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, kezaliman, dan pelanggaran amanah merupakan konsekuensi dari hilangnya orientasi moral dalam kehidupan publik (Hamka, 1989). Pandangan tersebut selaras dengan arah reformasi birokrasi yang menempatkan integritas sebagai instrumen utama dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbagai kajian mengenai implementasi budaya kerja BerAKHLAK menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi, tetapi juga oleh keberhasilan menginternalisasikan nilai-nilai etika ke dalam perilaku aparatur secara berkelanjutan (Sari et al., 2026; Nurmiyati, 2025). Dari perspektif kajian tafsir, relevansi pemikiran Hamka juga terletak pada pendekatan *adabī ijtīmā'ī* yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam merespons persoalan sosial kontemporer. Oleh karena itu, pemikiran Hamka tetap relevan sebagai sumber etika publik yang mampu memberikan landasan spiritual bagi agenda pembangunan karakter bangsa.

Dengan demikian, reformasi akhlak yang dikembangkan pemerintah tidak cukup dipahami sebagai proyek administratif atau kebijakan kelembagaan semata. Reformasi tersebut memerlukan fondasi moral yang mampu membentuk kesadaran batin, integritas, dan tanggung jawab sosial setiap individu. Dalam konteks inilah *Tafsir al-Azhar* menawarkan kontribusi yang signifikan. Penafsiran Hamka menunjukkan bahwa transformasi masyarakat harus dimulai dari pembentukan karakter yang berakar pada nilai amanah, keadilan, kejujuran, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan bagi kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadi modal etik dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, pemerintahan yang berintegritas, dan masyarakat Indonesia yang berkeadaban.

4. Kesimpulan

Penafsiran ayat-ayat akhlak dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka bukan sekadar doktrin moralitas yang pasif atau kesalehan individual, melainkan sebuah manifestasi dari paradigma tauhid yang integral di mana hubungan kepada Tuhan (*ḥabl min Allāh*) harus mewujudkan nyata dalam kepedulian sosial (*ḥabl min al-nās*). Menggunakan metode tahlili dengan pendekatan *adabī al-ijtimā'ī*, Hamka secara cerdas membumikan pesan moral universal Al-Qur'an ke dalam ruang kebudayaan Nusantara, sehingga teks suci menjelma menjadi pedoman praktis yang humanis dan transformatif. Hal ini tercermin kuat melalui penafsirannya terhadap QS. *an-Naḥl* [16]: 90 yang menetapkan keadilan dan kebajikan sebagai fondasi masyarakat berkeadaban, QS. *al-Baqarah* [2]: 8–10 yang menekankan pentingnya kejujuran batin guna menangkal penyakit kemunafikan yang merusak kepercayaan sosial, serta QS. *al-Nisā'* [4]: 58 yang mengonstruksi etika kekuasaan berbasis kompetensi dan amanah publik. Melalui pilar-pilar konseptual tersebut, pemikiran etis Hamka terbukti memiliki relevansi yang sangat kuat dengan agenda reformasi birokrasi dan pembangunan karakter bangsa saat ini, khususnya sebagai ruh spiritual-transendental bagi internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK. Penafsiran ini menegaskan bahwa reformasi moral kontemporer tidak boleh terjebak pada formalitas birokrasi dan kepatuhan administratif semata, melainkan harus berakar pada pembentukan integritas batin personal. Pada akhirnya, model etika publik yang moderat dan responsif dalam Tafsir al-Azhar ini tidak hanya meneguhkan identitas khas tafsir di Indonesia, tetapi juga terus relevan sebagai energi penggerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.



Berdasarkan hasil analisis dalam artikel ini, kedepan disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan melakukan kajian komparatif antara *Tafsir al-Azhar* dengan karya tafsir Nusantara kontemporer lainnya guna memetakan karakteristik khas masing-masing mufasir Nusantara dalam merumuskan agenda reformasi moral bangsa. Terakhir, penelitian masa depan juga perlu memperluas ruang lingkup kajian dengan melakukan kontekstualisasi terhadap ayat-ayat akhlak kemasyarakatan Hamka ke dalam ranah etika digital, sebagai upaya teoretis dan praktis untuk merespons tantangan modern berupa krisis adab di media sosial saat ini.

5. Daftar Pustaka

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. (2011). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Federspiel, Howard M. (1994). *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project.
- Gunawan, Gunawan, Nandang Alamsah Deliarnoor, & Neneng Yani Yuningsih. (2024). Peningkatan Performa Pelayanan Publik Melalui Penerapan Core Values BerAKHLAK di Kota Singkawang Tahun 2022–2023. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Gusmian, Islah. (2003). *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju.
- Halid, Ahmad Ridhoni Idham. (2026). Nilai-Nilai Kepemimpinan dalam Tafsir Al-Azhar: Studi tentang Keseimbangan antara Profesionalitas dan Spiritualitas. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa Indonesia*, 3(1).
- Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah). (1989). *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- M. Syaifuddin dan Moh. Muhtador. (2023). Corak Adabi Ijtimā'i dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka. *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadith Studies*.
- Nurmiyati. (2025). Etika Pemerintahan dalam Perspektif Core Values ASN BerAKHLAK. *Indonesian Journal of Democracy Studies*.
- Rozi, Syafwan, Nurlizam, dan M. Zubir. (2024). The Reception of Hamka's Tafsir Al-Azhar within Social Religious Issues in the Malay World. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 25(2), 247–272.
- Rush, James R. (2016). *Hamka's Great Story: A Master Writer's Vision of Islam for Modern Indonesia*. Madison: The University of Wisconsin Press.
- Sari, Devi Auliya, Dina Lestari, Dika Meisaroh, Natasya Alvionita, Mutia Sabila, & Atrika Iriani. (2026). Peran Core Value BerAKHLAK dalam Pembentukan Karakter ASN: Studi pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *JISOH*.
- Syawitri, S., Fitrisia, A., & Ofianto. (2022). Core Value Ber-AKHLAK Aparatur Sipil Negara sebagai Etika dan Budaya Kerja yang Profesional untuk Meningkatkan Pelayanan Prima. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Usman, Abur Hamdi, Mohd Farid Ravi Abdullah, Mazlan Ibrahim, dan Azwar Iskandar. (2022). Hamka's Review of Economic Verses in Tafsir Al-Azhar Using the Ijtima'i Methodological Approach. *Studia Quranika*, 7(1).

